

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apriadi, Heribertus. 2009. *Tinjauan Terhadap Fungsi Oditur Militer dalam Proses Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UAJY
- Bustommy, Achmad. *Kedudukan Perkara Koneksitas Dalam Pasal 89/94 UU.No.8 Tahun 1981 KUHAP dan Pasal 198/203 UU.No.31 Tahun 1997 Peradilan Militer Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam*. 2009. Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Prenhallindo
- Dinar, Raditya Arga. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011)*. Surabaya : Fakultas Hukum UPN Jawa Timur
- Effendy, Marwan. 2010. *Peradilan in Absentia dan Koneksitas*. Jakarta : Timpani Publishing
- Hadi, Mahfud. 2012. *Pemberlakuan Peradilan Koneksitas Dalam Perspektif Praktik Hukum Pidana*. Madura : Universitas Trunojoyo Madura
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid II*. Jakarta : Pustaka Kartini
- Haryanto, M. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Kritis Satya Wacana
- Ibrahim, Joohnny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru

- Linton, Suzannah. 2010. *Mempertanggungjawabkan Kekejaman-Kekejaman di Indonesia*. Jakarta : ELSAM
- Lisdianto, Viko Fajar. 2012. *Penyidikan Tindak Pidana Desersi oleh Anggota Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta NO. 43-K/PM II-11/AD/IV/2011 di Denpom IV/1 PWT*. Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed.
- Maheka, Arya. 2006. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya : Reality Publisher
- Mertokoesoemo, Soedikno. 1968. *Hukum dan Peradilan*. Yogyakarta : Gajah Mada
- Ngani Nico, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Bandung : CV. Mandiri Maju
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta : Atma Jaya
- Said Sissa Hadi dan Teguh Prasetyo. 2004. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Yogyakarta : Mitra Prasaja Offset
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Baru

Seno, Indriyanto Adji. 2003. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Konsultan Hukum dan Pengacara

Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta :Kencana

Soekanto, Soerjono. 1984. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia

Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Rangkang Education

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung : Mandar Maju

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, LN RI No. 67 Tahun 2004

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 1981/76, TLN No. 3209

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Militer, UU No. 31 Th. 1997, LN No. 1997/84; TLN No. 3713

### **Jurnal**

Agustinus PH. Prospekti dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam *Jurnal Hukum Militer, Volume I No.2 Nopember 2007*. 2007. Jakarta. Pusat Studi Hukum Militer STHM

Heniarti, Dini Dewi, Elsa R.M. Toule, dan Firdaus. 2011. *Konstruksi Model Sistem Integratif Peradilan Militer Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Prosiding SnaPP2011 : Sosial, Ekonomi, dan Humaniora

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI). "Jurnal Peradilan Indonesia". 2015. *Jurnal Berkala*. Vol.3.

Mia Kusuma Fitriana. "Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil". 2014. *Arena Hukum*. Vol. 7, No. 2.

### **Internet**

Abdur Rahman Halim. "Analisis Ketepatan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) dengan Pasal 90 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)". Portal Artikel Tugas Akhir, diakses dari <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/100111100042>, pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 16.20

Ant. "KPK Mulai Singgung Isu Korupsi TNI". *Transparency International*, yang diakses dari <http://www.ti.or.id/index.php/news/2014/01/08/kpk-mulai-singgung-isu-korupsi-tni>, pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 14.40

Dian Pratama Sandi. "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia", yang diakses dari [http://222.124.203.59/files/disk1/682/jbptunikompp-gdl-dianpratam-34097-11-unikom\\_d-l.pdf](http://222.124.203.59/files/disk1/682/jbptunikompp-gdl-dianpratam-34097-11-unikom_d-l.pdf), pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 09.04.

Emerson Yunho. "Peradilan Koneksitas Kasus Korupsi – Emerson Yuntho". 2017. *Tempo.co*, yang diakses dari <https://indonesiana.tempo.co/read/107001/2017/01/18/emerson/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi-emerson-yuntho>, pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 17.20

Fana Suparman. "Bongkar Suap Bakamla, KPK dan TNI Harus *Joint Investigation*". Berita Satu, yang diakses dari <http://www.beritasatu.com/hukum/406103-bongkar-suap-bakamla-kpk-dan-tni-harus-joint-investigation.html>, pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 12.15

ICTJ dan KontraS. "Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto". Jakarta. 2011, yang diakses

dari [https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-Indonesian\\_0.pdf](https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-Indonesian_0.pdf), pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 06.02

Mys. “*Penggunaan Sistem Peradilan Koneksitas Dipermasalahan*”. 2004. *Hukum Online*, yang diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10596/penggunaan-sistem-peradilan-koneksitas-dipermasalahan>, pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 19.06

Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian. “Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, yang diakses dari <https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 20.11

### **Wawancara**

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Yovandi Yazid, S.H., pada tanggal 13 Juli 2017